



## Dukung Kebijakan Pembatasan Jam Malam

**JOGJA, Radar Jogja** - Pemprov DIJ mengapresiasi kebijakan pencanangan jam malam bagi anak di bawah usia 18 tahun di Kota Jogja. Hal ini diyakini dapat menekan tindak kejahatan jalanan yang marak terjadi. Dan sebagai bentuk upaya penanganan bersama-sama.

Sekprov DIJ Kadamanta Baskara Aji mengatakan kebijakan Pemkot Jogja itu menjadi upaya yang cukup baik untuk membatasi anak-anak tidak terlalu malam berada di jalan. Salah satunya dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terutama dari sisi kekerasan. "Kalau malam kan biasa orang merasa lebih leluasa melakukan kejahatan. Anak-anak kan kewajibannya belajar, kalau tengah malam masih di jalan kapan belajarnya, saya kira nggak ada persoalan," katanya di Kompleks Kepatihan kemarin (24/6).

Aji menjelaskan kebijakan larangan anak di bawah usia 18 tahun meninggalkan rumah pada pukul 22.00-04.00 itu selaras dengan upaya pemprov mendirikan asrama semacam *boarding school* bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Kedua kebijakan tersebut diklaim memang saling berkaitan erat dengan keprihatinan pemerintah daerah terhadap kekerasan yang terjadi di jalanan yang akrab disebut klithih. Karena ada fenomena tersebut, maka provinsi kabupaten dan kota berupaya menekan. "Bahkan Pak Gubernur sudah membuat surat edaran kepada bupati wali kota yang intinya agar menjadikan ini (kekerasan) sebagai prioritas penanganan," ujarnya.

Tak tanggung-tanggung, demi prioritas penanganan klithih tersebut pemprov mengarahkan



RADAR JOGJA FILE

**RAZIA:**  
 Aparat kepolisian tengah melakukan pemeriksaan kepada pengguna jalan di malam hari.

kabupaten kota dapat mengalokasikan APBD masing-masing. Apabila ada kemungkinan dibutuhkan anggaran dalam rangka itu. "Biar serius, supaya Jogja yang banyak dipakai sebagai tempat tujuan pendidikan itu bisa memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan kepada mereka yang sekolah disini," jelasnya.

Upaya penanganan *klithih* ini tidak hanya dilakukan pemprov dan kota. Melainkan di kabupaten juga melakukan penanganan dalam bentuk lain, sesuai kearifan lokal masing-masing. Seperti ada pembinaan-pembinaan kepada para mantan pelaku. Pembinaan yang sudah bisa dilakukan di tingkat kabupaten akan di selesaikan di kabupaten. "Cuma penamaan programnya beda. Kami begitu, silakan saja mekanismenya seperti apa. Tapi kita berupaya mencegah supaya tidak terjadi kekerasan pada saat malam hari, kalau ada program yang diperlukan di provinsi ya dikirim aja ke kami nanti

kami yang akan menangani. Supaya kami bisa menyelesaikan semua," terangnya.

Menurutnya, selama ini kejahatan jalanan selalu terjadi pada malam hari. Sehingga dengan upaya membatasi anak-anak keluar malam bisa setidaknya mengurangi kegiatan malamnya. "Jadi kalau anak-anak yang biasa keluar malam hari, kemudian keluar tepat waktu mudah-mudahan akan mengurangi bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan," tambahnya.

Adapun pembangunan asrama di Pundong, Bantul bagi ABH masih terus berproses. Tahap sekarang ini adalah perancangan *detail engineering design* (DED). Dari DED akan muncul terkait biaya, bentuk asrama, fungsinya, hingga tata kalanya yang memungkinkan mengetahui target pembangunan selesai berapa tahun. "Tapi kalau programnya sudah jalan, walaupun belum menggunakan tempat disitu," imbuhnya. **(wia/bah/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005